

## DEMOKRASI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN: ANALISIS DATA PANEL 9 NEGARA ASEAN TAHUN 1973-2020

Zahran Ramadhan

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Corresponding Email: [zahranramadhan@students.undip.ac.id](mailto:zahranramadhan@students.undip.ac.id)

### ABSTRACT

*Studies on democracy and income inequality have produced diverse findings. There are still many limitations in the study of democracy and inequality, both methodologically and empirically. Many empirical studies discuss the relationship over the years with observations in multiple countries. Krauss (2015) argues that analyzing democracy and inequality through specific regions will yield deeper and more robust results. This research examines the relationship between democracy and income inequality using panel data from 9 ASEAN countries over the period from 1973 to 2020. Fixed effects panel data modeling and the democracy index published by Freedom House were used. The study finds a significant relationship between democracy and income inequality, indicating that more democratic countries tend to experience increased income inequality. Based on these findings, democracy in ASEAN has not yet reached the point of institutionalized democracy or the phase where democracy would reduce income inequality. This research attempts to offer contextual explanations and mechanisms that may lead to these findings for the ASEAN region.*

*Keywords: Inclusive Democracy, Political and Civil Liberties, Democratic Institutions, Economic Inequality, Panel Data, and ASEAN.*

 <https://doi.org/10.14710/djoe.36929>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

### PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang melibatkan warga negara secara aktif dalam pengambilan kebijakan politik. Sedangkan dalam literatur ekonomi politik, demokrasi disinyalir menjadi jawaban untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Demokratisasi akan memperluas kekuasaan politik untuk masyarakat miskin. Dengan begitu akan meningkatkan tendensi kebijakan kepada masyarakat miskin seperti kebijakan redistribusi sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan. Namun, ada limitasi terkait kompleksitas dari hubungan demokrasi dan ketimpangan pendapatan. Banyaknya penelitian yang sudah ada memfokuskan pada analisis empiris dengan periode waktu yang panjang serta observasi banyak negara. Krauss (2015) menyatakan apabila penelitian demokrasi sebaiknya melihat dalam satu wilayah tertentu akan membuahkan hasil yang mendalam dan komprehensif.

Penelitian ini akan membahas hubungan demokrasi dan ketimpangan pendapatan 9 Negara ASEAN (Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Singapura, dan Vietnam) dari tahun 1973-2020. Asia tenggara

sendiri memiliki sejarah yang dinamis dalam literatur rezim politik dan banyak transformasi dalam pembangunan demokrasi. Myanmar menerapkan rezim militer. Laos dan Vietnam dengan sistem politik satu partai. Kamboja, Singapura dan Malaysia masih mempertahankan satu partai yang dominan. Hanya Thailand, Indonesia dan Filipina yang lebih demokratis. Meskipun mereka tidak sepenuhnya demokratis karena tidak mampu memperbaiki nilai hak asasi manusia, politik dan sipil.

Ada tiga mekanisme umum yang menjelaskan demokrasi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan secara langsung Timmons (2010). Mekanisme pertama dan yang paling banyak dikutip melalui pajak dan transfer, mekanisme kedua melalui kontestasi politik, dan yang terakhir mekanisme melalui regulasi pasar tenaga kerja.

Untuk hasil empiris untuk topik demokrasi dan ketimpangan pendapatan masih belum mencapai konklusi. Hubungan demokrasi meningkatkan ketimpangan ditunjukkan oleh Wagle (2009); hubungan demokrasi menurunkan ditunjukkan oleh (Corneo dan Neher 2018; Dodlova dan Giolbas 2015; Reuveny dan Li 2003); dan tidak ada hubungan antara demokrasi dan ketimpangan ditunjukkan oleh (Acemoglu et al. 2015; Kotera & Okada 2015; Nikoloski 2015; Timmons 2010). Peneliti seperti Lee (2005) menunjukkan adanya demokrasi menurunkan ketimpangan secara tidak langsung.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Wagle (2009) meneliti kausalitas demokrasi dan ketimpangan di Asia Selatan. Menggunakan metode 3SLS, mencakup 5 negara Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka selama periode waktu 1980 – 2003. Hasilnya menunjukkan bahwa institusi demokrasi berpengaruh meningkatkan terhadap ketimpangan pendapatan dan kebebasan sipil dan politik memiliki pengaruh menurunkan ketimpangan pendapatan. Penulis berpendapat bahwa kelas elite mengambil keuntungan dari demokratisasi dari kemampuan mereka untuk membuat dan implementasikan kebijakan.

Reuveny dan Li (2003) meneliti hasil empiris yang penting dari literatur demokrasi dan ketimpangan pendapatan. Penelitiannya melihat hubungan dari demokrasi dan keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Menggunakan alat analisis OLS, dengan sampel 69 negara dari tahun 1960-1996. Hasil yang diperoleh demokrasi menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Dodlova dan Giolbas (2015) melakukan penelitian mengenai redistribusi terhadap program transfer sosial yang berfokus di antara negara demokrasi dan otokrasi. Menggunakan sampel 141 negara dari tahun 1960-2010 hasilnya menunjukkan bahwa negara demokrasi lebih memiliki program transfer sosial dibandingkan otokrasi. Selain itu, meningkatnya ketimpangan pendapatan mendorong negara untuk mengadopsi kebijakan transfer sosial. Penelitian ini mengkonfirmasi teori Acemoglu dan Robinson (2000). Pada saat ketimpangan meningkat, negara akan melakukan demokratisasi untuk mencegah adanya revolusi dan upaya mempertahankan kekuasaan.

Corneo dan Neher (2018) menguji validitas pandangan MV terhadap permintaan redistribusi. Teori yang ditawarkan ialah MV lebih efektif terhadap kelompok elite dan juga kebijakan redistribusi bukan satu-satunya isu masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Menggunakan alat analisis Logit Model di 163

Negara, hasilnya menunjukkan bahwa negara yang mengimplementasikan demokrasi, MV mendapatkan apa yang mereka minta untuk redistribusi. Sebagai tambahan, kebijakan redistribusi bukan satu-satunya isu dalam pemilu menjadi alasan mengapa pemerintah tidak mengimplementasikan redistribusi dengan baik.

Dalam paper yang berjudul “Does Democracy Reduce Inequality?” Timmons (2010) memperbaiki data dan alat analisis yang dilakukan oleh Reuveny dan Li (2003). Menambahkan periode waktu dari 1960-2004 untuk 146 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan demokrasi dan ketimpangan pendapatan. Dari hasil tersebut, beliau mengatakan apabila ada permasalahan dari kompleksitas hubungan demokrasi dan ketimpangan pendapatan.

Nikoloski (2015) menggunakan observasi sebanyak 77 negara dari tahun 1962-2006. Menggunakan alat analisis GMM untuk melihat hubungan jangka pendek dan panjang. Hasilnya menunjukkan tidak ada hubungan antara demokrasi dan ketimpangan pendapatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Variabel ekonomi seperti modal manusia, keterbukaan perdagangan, konsumsi pemerintah yang masih menjadi faktor determinan dari ketimpangan pendapatan.

Kotera dan Okada (2015) memeriksa perubahan ukuran pemerintah sebelum dan sesudah demokratisasi. Menggunakan alat analisis instrumental variable dengan sampel sebanyak 125 negara dari tahun 1972-2010. Hasilnya menunjukkan demokrasi tidak memiliki dampak terhadap total pengeluaran pemerintah, tetapi adanya demokratisasi menurunkan pengeluaran militer dan meningkatkan pengeluaran kesehatan. Penurunan tersebut karena di negara tidak mengalokasikan pengeluaran militer untuk melakukan tindakan represif seperti yang dilakukan negara otokrasi.

Sementara itu, Acemoglu et al. (2015) meneliti dari sudut pandang teoritis dan juga empirisnya. Dengan sampel yang lebih besar 184 negara dari tahun 1960-2010, penelitiannya tidak menemukan apabila demokrasi menurunkan ketimpangan pendapatan. Tetapi, demokratisasi mampu meningkatkan pajak dan pendapatan pemerintah. Hasil ini mengkonfirmasi dasar model teori Meltzer dan Richard (1981) adanya demokrasi, kelompok penduduk dengan pendapatan rata-rata akan meminta pajak yang lebih tinggi untuk mengharapkan redistribusi.

Demokrasi tidak memiliki hubungan langsung terhadap ketimpangan pendapatan, namun adanya demokratisasi, ukuran pemerintah akan berubah dari positif menuju negatif. Lee (2005) menggunakan Random Effects dari 64 negara periode waktu 1970-1994. Hasilnya selaras dengan hipotesis, bahwa ketimpangan pendapatan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran pemerintah. Dalam titik tertentu, ketimpangan pendapatan menurun karena adanya demokratisasi. Ini dikarenakan adanya institusi negara yang lebih efektif untuk merealisasikan permintaan distribusi dari masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Berisi Pada tahap ini pemeriksaan pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan menambahkan 5 variabel kontrol. Kelima variabel kontrol terdiri dari, (1) rasio pengeluaran pemerintah per PDB; (2) modal manusia; (3) pendapatan perkapita; (4) populasi; dan (5) pertumbuhan perdagangan. Adapun pemilihan kelima variabel tersebut digunakan karena secara teoritis dianggap memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan data dengan struktur panel

atau gabungan antara data *cross-section* dan *time series*. Observasi pada penelitian ini mencakup 9 negara di ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam selama periode 1972-2020.

Penelitian ini menggunakan data indeks gini dari *the Standardize World Inequality Indicators Database (SWIID)* yang dikonstruksi oleh Frederick Solt (Solt 2019). Keuntungan menggunakan data tersebut memberikan cakupan waktu yang panjang dan juga ketersediaan negara observasi sesuai penelitian yang diinginkan sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

FH sejak tahun 1973 sudah mengeluarkan laporan tahunan *Freedom in the world* untuk mengevaluasi kondisi kebebasan sipil dan hak politik di dunia. Kebebasan sipil dibagi menjadi empat subkategori: 1) kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, 2) hak berserikat dan organisasi, 3) aturan hukum, dan 4) otonomi pribadi dan hak individu. Kebebasan sipil memiliki skor dengan rentang 0 – 60. Kemudian hak politik dibagi menjadi tiga subkategori: 1) proses pemilihan, 2) pluralisme dan partisipasi politik, dan 3) fungsi pemerintah.

Di dalam laporan tersebut, FH mengelompokkan negara menjadi tiga kelompok status: *free*, *partly free*, dan *not free*. Pengelompokan tersebut berdasarkan kombinasi nilai rata-rata dari kebebasan sipil dan hak politik. Masing-masing kategori memiliki rentang nilai dari 1 hingga 7. Dimana, 1 merupakan derajat negara *free* atau demokrasi penuh dan 7 merupakan derajat negara *not free* atau autokrasi.

Kejelasan metodologi yang dilakukan FH menjadi alasan untuk menggunakan indeks demokrasi dari lembaga tersebut. Selain itu, data FH juga sering digunakan pada literatur terdahulu. Ketersediaan waktu yang panjang diharapkan bisa memberikan hasil yang komprehensif untuk penelitian ini.

Statistik deskriptif dari data yang digunakan disajikan dalam tabel 1.1. Tabel statistik deskriptif menyajikan nilai mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Nilai mean menunjukkan rata-rata dari setiap variabel penelitian. SD merupakan sebaran berdasarkan akar dari varians yang menunjukkan keragaman kelompok data. Nilai minimum menggambarkan nilai terendah dari setiap variabel penelitian dan nilai maksimum menggambarkan nilai tertinggi dari setiap variabel penelitian.

Tabel 1. Statistik 9 Negara ASEAN

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Min	Max	Jumlah Observasi
Gini	0.389	0.042	0.299	0.480	432
Demokrasi	5.081	1.446	2	7	428
Rasio pengeluaran pemerintah (% dari PDB)	0.439	0.128	0.451	0.728	367
Modal manusia	1.998	0.534	1.162	4.352	423
PDB perkapita (perumbuhan, %)	4.123	4.337	-14.35	12.72	387
Populasi (pertumbuhan, %)	3.033	3.893	-3.374	18.23	432
Perdagangan (perumbuhan, %PDB)	105.56	107.36	1.294	437.2	339

Nilai indeks gini memiliki rata-rata sebesar 0,389 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0042. Selain itu, tingkat indeks gini terendah berada pada nilai 0,299 untuk negara Laos pada tahun 1973 dan tertinggi sebesar 0,480 untuk negara Malaysia pada tahun 1978.

Nilai demokrasi memiliki rata-rata sebesar 5,081 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,878. Selain itu, tingkat demokrasi terendah berada pada nilai 2 untuk

Filipina pada tahun 1987 dan tertinggi sebesar 7 untuk Vietnam pada tahun 1977-1981, Kamboja pada tahun 1976-1990 dan Myanmar pada tahun 1989-2010.

Nilai rasio pengeluaran pemerintah memiliki rata-rata sebesar 0,789 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,322. Selain itu, rasio pengeluaran pemerintah terendah berada pada nilai 2 untuk Laos pada tahun 1986 dan tertinggi sebesar 7 untuk Vietnam pada tahun 2004.

Nilai modal manusia memiliki rata-rata sebesar 1,998 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,338. Selain itu, modal manusia terendah berada pada nilai 0,066 untuk Myanmar pada tahun 1973 dan tertinggi sebesar 1,763 untuk Singapura pada tahun 2019.

Nilai persentase pertumbuhan pendapatan perkapita memiliki rata-rata sebesar 5,122 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,322. Selain itu, persentase pertumbuhan pendapatan perkapita terendah berada pada nilai 0,058 untuk Kamboja pada tahun 1994 dan Indonesia di tahun 1998 dan tertinggi sebesar 1,774 untuk Kamboja pada tahun 2004.

Nilai persentase pertumbuhan populasi memiliki rata-rata sebesar 3,033 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,146. Selain itu, persentase pertumbuhan populasi terendah berada pada nilai 0,648 untuk Kamboja pada tahun 1978 dan tertinggi sebesar 1,322 untuk Malaysia pada tahun 1982.

Nilai persentase pertumbuhan perdagangan memiliki rata-rata sebesar 105,56 dengan nilai standar deviasi sebesar 10284,4. Selain itu, persentase pertumbuhan perdagangan terendah berada pada nilai 114,986 untuk Malaysia pada tahun 2019 dan tertinggi sebesar 57378,86 untuk Singapura pada tahun 2008.

Penelitian ini akan diestimasi menggunakan pendekatan *Fixed Effects Method* (FEM). Memilih FEM karena variabel independent dalam model penelitian diduga memiliki korelasi terhadap eroe. Korelasi ini antara lain disebabkan karena adanya kemungkinan variabel yang belum dimasukkan dalam model sehingga mengakibatkan bias. Penggunaan FEM akan mengurasi bias yang disebabkan oleh variabel yang nilainya tetap sepanjang waktu, tetapi berbeda antar negara. Pada model akan memasukkan *country fixed effects* untuk mengontrol karakteristik spesifik di tiap negara yang konstan dari waktu ke waktu. Secara umum, model empiris secara matematis dalam penelitian ini diekspresikan sebagai berikut:

$$Gini_{it} = \alpha + \beta Democ_{it} + \gamma Control_{it} + \delta_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

di mana  $GINI_{it}$  merupakan variabel ketimpangan pendapatan di negara  $i$  pada tahun  $t$ ;  $\beta DEMOC_{it}$  merupakan variabel demokrasi di negara  $i$  pada tahun  $t$ ;  $Z_{it}$  merupakan kumpulan variabel kontrol yang terdiri dari persentase pengeluaran pemerintah per PDB, persentase penerimaan pemerintah per PDB, populasi, pendapatan per kapita dan angka partisipasi sekolah tingkat menengah di negara  $i$  pada tahun  $t$ ; dan  $u_{it}$  merupakan gangguan di negara  $i$  pada tahun  $t$ .

## HASIL DAN PEMBAHSAN

Bagian hasil estimasi model empiris akan menjabarkan mengenai hasil pengujian asumsi dasar *Fixed Effect* dan interpretasi inferensial secara statistik dari hasil estimasi model empiris pada penelitian ini. Hasil utama penelitian disajikan dalam

Tabel 1. Berdasarkan hasil estimasi tersebut tidak memiliki masalah multikolinearitas sempurna. Akan tetapi, dalam model ini terdapat masalah autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk memoderasi masalah autokorelasi dan heterokedastisitas, *white robust standard error* akan dilaporkan. Selain itu, berdasarkan jurnal (Bruno, Giovanni 2005) penelitian ini menggunakan LSDV dinamis untuk mengatasi permasalahan dimana jumlah observasi yang lebih sedikit dibandingkan jumlah periode waktunya. Disisi lain, model kemungkinan tidak bisa memenuhi asumsi *zero conditional mean* karena ada kemungkinan faktor-faktor di luar model yang belum terkontrol. Hal tersebut berimplikasibahwa hasil penelitian tidak menjelaskan hubungan kausal, melainkan hanya hubungan korelasi.

Tabel 2. Hasil Estimasi Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan

	<i>Robust Standard Error</i>	<i>Dynamic LSDV</i>
Gini Lagged		0.971*** (0.014)
Indeks Demokrasi	-0.01*** (0.002)	-0.001** (0.001)
Rasio pengeluaran pemerintah	0.006 (0.009)	-0.001 (0.001)
Modal manusia	0.002 (0.011)	0.0009 (0.001)
Pendapatan perkapita	0.0001 (0.001)	0.00008* (0.001)
Populasi	0.004*** (0.001)	0.0003 (0.001)
Perdagangan	0.001 (0.001)	-0.0001** (7.490)
Konstanta	0.426*** (0.025)	
<i>R</i> <sup>2</sup>	0.322	
<i>F</i>	27.093	
Jumlah Tahun	48	48
Jumlah Observasi	316	302
Jumlah Negara	9	9

Penelitian ini memeriksa pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam keadaan distribusi pendapatan terkonsentrasi di kelompok masyarakat elite, sistem demokrasi melalui MVT menyediakan akses voting untuk tingkat pajak yang mana tingkat pajaknya mengacu pada preferensi yang disukai oleh agen non-elite atau tingkat pajak yang lebih besar dari 0. Asumsi pemerintah melakukan redistribusi, menggunakan seluruh pajak proporsional untuk transfer langsung. Naiknya tingkat pajak akan meningkatkan transfer langsung yang mana itu berhubungan dengan meningkatnya pendapatan setelah pajak agen non-elite atau jarak antara agen elite dan non-elite semakin kecil

Berdasarkan hasil temuan empiris pada penelitian ini semakin demokrasi negara di ASEAN, maka semakin tinggi ketimpangan pendapatannya. Hal ini tidak sejalan teori yang telah dikonstruksi, dimana demokrasi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Acemoglu menuliskan ada hal yang menyebabkan demokrasi tidak dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Pemilihan umum bukan hanya satu dari ekuilibrium kebijakan, namun ada aktifitas lobi politik. Dalam situasi seperti ini,

organisasi yang memiliki sumber daya besar melalui jalur ini punya pengaruh yang besar untuk kebijakan dibandingkan dengan sekelompok masyarakat besar.

Secara de jure demokrasi mampu memberikan kekuasaan kepada kelompok non-elite. Namun, kelompok elite bisa mengambil tindakan lain dengan cara meningkatkan kekuasaan de facto mereka. Karena kelompok elite memiliki kekuasaan lebih dibandingkan non-elite, maka mereka bisa melakukan aktivitas lobi politik dan tindakan respresi melalui hukum (Acemoglu et al. 2015). Sebagai contoh, kelompok elite bisa kontrol agenda partai politik ataupun merubah pandangan ideologi politik melalui media.

Dalam keadaan seperti ini, demokratisasi tidak akan sebesar yang diharapkan untuk menurunkan ketimpangan karena kelompok elite yang masih kekuatan kontrol politik. Argumen lain apabila demokrasi disfungsi ialah bentuk institusi autokrasi yang masih mengakar secara historis. Elite bisa mengontrol demokrasi dengan membentuk koalisi dengan menjaga negara agar tetap lemah. Dengan begitu, demokrasi memang akan meningkatkan pajak yang digunakan untuk kepentingan politik sehingga tidak dapat meningkatkan redistribusi ataupun menurunkan ketimpangan pendapatan.

Sedangkan Lee (2005) berargumen dimana negara yang memiliki korelasi positif antara rasio pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan masih berada pada tahap demokrasi terbatas. Atau dalam kata lain, bentuk demokrasi di Asia Tenggara belum mencapai titik *institutionalized democracy* yang bisa menurunkan ketimpangan pendapatan.

Christie (1998) menuliskan bahwa bentuk demokrasi di Asia Tenggara ialah *illiberal* demokrasi. *Illiberal* demokrasi sendiri merupakan sistem demokrasi tanpa kebebasan konstitusional yang mengakibatkan pemerintah melakukan rezim yang terpusat, pengikisan kebebasan sipil, persaingan antar etnis, konflik dan perang. Dalam kata lain, sistem pemerintahan yang tetap melaksanakan pemilu, tetapi mengekang kebebasan sipil sehingga warga tidak mengetahui aktivitas pemerintah sepenuhnya. Dalam penelitian tersebut dikatakan Asia Tenggara merespon penuh untuk pertumbuhan ekonomi, namun mencegah liberalisasi politik. Pemerintahan di Asia Tenggara mempercayai adanya perbedaan dan nilai yang unik dibandingkan demokrasi di Barat. Sebagai contoh, Lee Kuan Yew tidak percaya pada demokrasi akan menggiring pada pembangunan ekonomi. Beliau percaya negara harus lebih disiplin dibandingkan demokrasi. demokrasi menggiring pada ketidakdisiplinan dan memperkusut kondisi yang berbahaya untuk pembangunan.

*Illiberal* demokrasi di Asia Tenggara elite negara menggunakan demokrasi sebagai strategi untuk mengatur bentuk ekonomi-sosial mengubahnya pada modernisasi ekonomi (Christie 1998). Alih-alih demokratisasi sebagai mengarah pada otonomi masyarakat sipil, reformasi politik di Asia Tenggara dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan juga meningkatkan keamanan politik. Karakteristik demokrasi Asia Tenggara dibawah pengawasan yang ketat termasuk patron-klien, personalisme, partai politik yang dominan, dan politik negara yang ketat.

Menurut Aspinall (2015) demorkasi di Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand sangat kental dengan politik uang yang berkaitan dengan kultur patron-klien. Ada 3 pola patronase yang biasanya nampak di Asia Tenggara. Pertama, *vote buying* dimana pertukaran langsung uang, barang dan jasa untuk suara saat pemilu. Di Filipina, Indonesia dan Thailand malam hari sebelum

pemilu, masyarakat diberi uang untuk memilih salah satu kandidat atau di Indonesia bias disebut serangan fajar. Kedua, individu dapat bergabung dengan partai untuk mendapatkan sumber daya patronase dan promosi melalui hirarki partai. Namun, untuk naik partai berbasis patronase biasanya penting untuk membangun patron di atas dan membangun basis dukungan di bawah. Sebagai contoh di Indonesia pada masa Orde Baru, partai Golkar menjadi instrumen bagi para birokrat, pengusaha dan elit yang berbasis daerah. Aktor-aktor tersebut mendapatkan akses untuk kontrak proyek pemerintah, izin untuk penambangan, perkebunan, atau kegiatan lainnya. Ketiga, membangun koalisi partai pemerintah. Pemimpin partai politik menggunakan patronase untuk menarik partai politik atau kelompok lain masuk ke dalam koalisi pemerintahan terpilih. Pola nya bisa berupa jabatan pemerintah seperti kursi di kabinet. Contoh paling sederhana adalah pembentukan pemerintahan koalisi ketika partai-partai kecil sering tergoda ke dalam pemerintahan dengan janji-janji jabatan kabinet atau keuntungan lainnya (mungkin contoh paling terkenal dalam ingatan hidup di wilayah itu adalah apa yang disebut 'kabinet buffet' Chatichai Choonavan dari tahun 1988 hingga 1991 di Thailand).

## KESIMPULAN

Penelitian ini memeriksa bagaimana pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil, penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari demokrasi terhadap ketimpangan pendapatan di mana ketika semakin baik demokrasi negara di Asia Tenggara maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Begitupun sebaliknya, Ketika negara semakin tidak demokrasi maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Penulis berargumen fenomena ini terjadi karena negara di Asia Tenggara belum mencapai *institutionalized democracy*. Dimana negara belum mampu menciptakan suatu institusi yang baik sehingga kehadiran demokrasi tidak akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang terletak pada tataran teoritis dan empiris. Pada tataran teoritis, penelitian ini tidak mencakup aspek eksternal dalam konstruksi teoritis. Maka, dengan masukkan aspek eksternal pada konstruksi teoritis akan menciptakan fondasi yang lebih kuat dan pengembangan teoritis yang lebih luas. Keterbatasan dalam penggunaan data demokrasi. FH sudah mencakup konstruksi indeks yang komprehensif. Namun, ada beberapa sumber data seperti Polity V dan The Economist Intelligence Unit yang mungkin akan lebih komprehensif dalam membandingkan angka politik. Seperti penelitian Siourounis dan Papaioannou (2008) yang menggunakan banyak mengkonstruksi sumber data demokrasi yang kemudian akan lebih robust dalam penarikan kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2015). *Handbook of income distribution: Democracy, redistribution, and inequality* (Vol. 1).
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2000). Why did the West extend the franchise? Democracy, inequality, and growth in historical perspective. *Quarterly Journal of Economics*, 115(4), 1167–1199.
- Bruno, G. S. F. (2005). Estimation and inference in dynamic unbalanced panel-data models with a small number of individuals. *Stata Journal*, 5(4), 473–500.



- Christie, K. (1998). Illiberal democracy, modernisation and Southeast Asia. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 91, 102–118. <https://www.jstor.org/stable/41802094>
- Corneo, G., & Neher, F. (2018). *Democratic redistribution and rule of the majority* (CESifo Working Paper). Munich. <http://hdl.handle.net/10419/174959>
- Dodlova, M., & Giolbas, A. (2015). *Regime type, inequality, and redistributive transfers in developing countries* (GIGA Working Papers). Hamburg.
- Kotera, G., & Okada, K. (2015). How does democratization affect the composition of government expenditure? Munich. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/67085/>
- Krauss, A. (2015). The scientific limits of understanding the (potential) relationship between complex social phenomena: The case of democracy and inequality. *Journal of Economic Methodology*, 23(1), 97–109.
- Lee, C. S. (2005). Income inequality, democracy, and public sector size. *American Sociological Review*, 70(1), 158–181.
- Meltzer, A. H., & Richard, S. F. (1981). A rational theory of the size of government. *Journal of Political Economy*, 89(5), 914–927.
- Nikoloski, Z. (2015). Democracy and income inequality: Revisiting the long- and short-term relationship. *Review of Economics and Institutions*, 6(2), 24. <http://www.rei.unipg.it/rei/article/view/138>
- Reuveny, R., & Li, Q. (2003). Economic openness, democracy, and income inequality: An empirical analysis. *Comparative Political Studies*, 36(5), 575–601.
- Siourounis, E., & Papaioannou, G. (2008). Democratisation and growth. *Economic Journal*, 118(532), 1520–1551.
- Solt, F. (2019). Measuring income inequality across countries and over time: The Standardized World Income Inequality Database (SWIID) version 8.2, November 2019.
- Timmons, J. F. (2010). Does democracy reduce economic inequality? *British Journal of Political Science*, 40(4), 741–757.
- Wagle, U. R. (2009). Inclusive democracy and economic inequality in South Asia: Any discernible link? *Review of Social Economy*, 67(3), 329–357.